

DINAMIKA ISLAMISME DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI PADA MASA RECEP TAYYIP ERDOGAN

¹Novi Rizka Amalia, ²Fathan Fauzan Alhakim, ³Ahmad Naufaldi, ⁴
Akmal Aziz, ⁵Roziqk Heally

Hubungan Internasional, Universitas Darussalam Gontor

novirizka@unida.gontor.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang dinamika kepemimpinan Erdogan dalam perkembangan Islamisme di Turki pada masa kepemimpinannya termasuk dalam pengaruhnya pada kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini juga membahas dari perspektif kebijakan luar negeri menurut Graham T. Allison dan menjadikan Erdogan sebagai aktor rasional dalam kebijakan luar negeri Turki. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan kajian literatur dan menggunakan perspektif Kebijakan Luar Negeri. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah literatur tentang Kebijakan Luar Negeri dan juga identitas politik Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dinamika islamisme pada masa kepemimpinan Erdogan serta mengetahui arah kebijakan luar negerinya. Model Aktor Rasional mempengaruhi Orientasi Politik Identitas Turki yang lebih condong ke Politik Islam. Orientasi kebijakan luar negeri ini juga akan mempengaruhi kerja sama Turki dengan negara-negara potensial di sekitarnya.

Kata Kunci: Islamisme; Kebijakan Luar Negeri Turki; Model Aktor Rasional

Abstract

This research discusses the dynamics of Erdogan's leadership in the development of Islamism in Turkey during his leadership, including his influence on foreign policy. This research also discusses from a foreign policy perspective according to Graham T. Allison and makes Erdogan a rational actor in Turkish foreign policy. This research uses a descriptive qualitative method based on literature review and uses a foreign policy perspective. The data presented in this study are literature on foreign policy and also Islamic political identity. The purpose of this research is to find out the dynamics of Islamism during Erdogan's leadership and to find out the direction of his foreign policy. The Rational Actor Model influences the Turkish Identity Political Orientation which is more inclined to Islamic Politics. This foreign policy orientation will also affect Turkey's cooperation with potential countries around it.

Keywords: *Islamisme; Turkey Foreign Policy; Rational Actor Model*

Pendahuluan

Turki merupakan negara mayoritas Muslim dengan sejarah panjang, telah mengalami berbagai perubahan politik dan sosial selama beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek yang signifikan adalah pengaruh Islamisme dalam politik negara tersebut, terutama selama masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan. Penelitian ini akan mengeksplorasi perkembangan dan dinamika Islamisme di Turki selama masa Erdoğan, termasuk pengaruhnya pada kebijakan dalam dan luar negeri.

Pada tahun 1970-an, Erdoğan memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Kesejahteraan Islam (Refah Partisi). Pada tahun 2001, ia mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), yang sekarang menjadi kekuatan politik terbesar di Turki. Selama

masa jabatannya sebagai Perdana Menteri Turki dari tahun 2003 hingga 2014, Erdoğan mengawasi pertumbuhan ekonomi dan reformasi politik yang signifikan. Dinamika perubahan sistem politik di Turki yang dipengaruhi oleh ideologi Islam yang amat kuat dari Erdogan, sehingga gerakan Islamisme di Turki bergerak amat cepat. Gerakan ini tentunya menuai banyak respon negatif maupun positif sehingga ada beberapa konflik yang terjadi, karena banyak kelompok sekuler yang mencoba menjatuhkan kekuasaan Erdogan dan mengubah kebijakan yang ada.

Istilah "Islamisme Erdogan" mengacu pada ideologi dan perspektif politik Islamisme yang dikaitkan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Gerakan politik Islamisme bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik dan hukum negara. Latar belakang politik Recep Tayyip Erdoğan terkait dengan Islamisme. Ia adalah anggota Partai Kesejahteraan Islam (Refah Partisi) dan aktif dalam gerakan Islamis di Turki pada awal kariernya. Setelah pemerintah membubarkan Partai Kesejahteraan Islam pada tahun 1997, Erdoğan dan Abdullah Gül mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada tahun 2001. AKP sering digambarkan sebagai partai Islamis moderat. Erdoğan telah memperkuat identitas Islamis dan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan dan politik selama jabatannya sebagai Perdana Menteri dan kemudian Presiden (Nabilah, 2015).

Sebagai seorang politisi yang berasal dari latar belakang Islamisme dan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), visi politik Erdogan telah mencakup beberapa elemen utama yaitu Islam dan Nilai-Nilai Konservatif, Penguatan Kekuatan Eksekutif, dan Pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dan konservatif, Erdogan telah menekankan pentingnya identitas Islam dan nilai-nilai konservatif dalam politik dan masyarakat Turki. Ia memandang bahwa nilai-nilai agama dan budaya Islam harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari negara, dan peran agama dalam masyarakat harus dihormati dan diakui.

Dalam memperkuat Kekuasaan Eksekutif sejak menjadi Presiden Turki, Erdogan telah berupaya untuk mengubah sistem pemerintahan negara tersebut dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial yang lebih kuat. Ini bertujuan untuk memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar pada presiden dan mengurangi peran parlemen dan mekanisme pengawasan.

Selama masa pemerintahannya, Erdogan telah menekankan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Pemerintahannya telah melakukan sejumlah proyek besar untuk memperbaiki infrastruktur negara, termasuk jalan raya, bandara, dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Erdogan telah bermain peran aktif dalam kebijakan luar negeri Turki, termasuk intervensi dalam konflik regional seperti di Suriah dan dukungan terhadap Palestina. Dia juga telah berusaha untuk memperkuat hubungan Turki dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah dan dunia lainnya (Junaidi, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan pertanyaan muncul tentang bagaimana dinamika Islamisme dan kebijakan luar negeri turki pada masa kejayaan Recep Tayyip Erdogan?

Hasil dan Diskusi

Perubahan Sistem Politik & Konstitusional

"Revolusi Kemalisme", yang berlangsung dari tahun 1922 hingga 1938, menciptakan Negara Turki modern. Kenyataan ini mendukung gagasan bahwa revolusi telah memainkan peran penting dalam pembentukan negara modern. Revolusi adalah realitas. Hampir semua negara besar saat ini dibentuk oleh revolusi. Proses transformasi Turki dari Kesultanan Ottoman menjadi Republik Turki melibatkan reorganisasi

politik berdasarkan prinsip yang sangat berbeda dari yang dianut di Barat. Mustafa Kemal memiliki tujuan yang jelas: mendirikan Turki sebagai negara bangsa yang terhormat dengan model negara-negara Barat dan memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang cukup untuk mempertahankan posisi itu. Dia percaya bahwa Turki memiliki peluang besar untuk maju dengan meniru negara-negara Barat. Namun, karena otoritarianisme yang kuat dalam perubahan politik Turki selama masa Mustafa Kemal, beberapa orang menganggap bahwa demokrasi dengan obsesi sekularismenya merupakan konsep yang "pincang" dalam praktiknya (Khairil Musthafa, 2022).

Setelah berhasil menduduki kepemimpinan atas turki Erdogan melakukan banyak perubahan dalam politik turki baik dalam sistem maupun konstitusi. Selama masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan di Turki, terjadi beberapa perubahan signifikan terkait sistem politik dan konstitusional. Beberapa perubahan tersebut meliputi:

- 1) Pergantian dari Sistem Parlemerter ke Sistem Presidensial.
- 2) Peran Eksekutif yang Diperkuat dengan kekuasaan eksekutif yang lebih besar pada Presiden.
- 3) Penyusunan Ulang Pengadilan dengan kekhawatiran mengenai independensi pengadilan.
- 4) Pembatasan Kebebasan Pers dan Hak Asasi Manusia dengan tekanan pada oposisi dan kritikus pemerintah.
- 5) Pemangkasan Wewenang Parlemen dengan berkurangnya kekuasaan legislatif dan pengawasan parlemen (Khairil Musthafa et al., 2022).

Peran Islamisme Dalam Kebijakan Luar Negeri Turki

Politik luar negeri menurut Yanyan Mochamad Yani merupakan action theory atau jalur untuk mencapai kepentingan nasional dengan

menerapkan suatu kebijaksanaan. Graham T. Allison dalam bukunya "*The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*" yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1971, menganalisis krisis misil Kuba dan menjelaskan bahwa terdapat tiga model pembuatan keputusan yang berbeda untuk diambil dalam situasi tertentu. Yaitu model Rasional, Organisasi dan Kepemimpinan.

Model Rasional berasumsi bahwa aktor pemerintah sebagai aktor yang rasional dapat mengambil keputusan berdasarkan beberapa pertimbangan. Sehingga disini bisa dikatakan bahwa Organisasi Pemerintah merupakan Aktor Rasional atau Aktor utama yang menjalankan pengambilan keputusan berdasarkan beberapa rasionalisasi. Terkait dengan model rasional ini, beberapa berasumsi bahwa yang dimaksud dengan "rasional" adalah tindakan atau perilaku yang mencerminkan tujuan atau niat. Masing-masing berasumsi bahwa aktor utamanya adalah pemerintah. Adapula asumsi bahwa tindakan tersebut dipilih sebagai solusi yang diperhitungkan terhadap suatu masalah strategis. Dalam banyak hal, perbedaan dalam pemikiran Morgenthau dan Schelling sangat jelas bahwa masing-masing yang menerapkan Model Rasional ini akan menyoroiti kesamaan dasar antara metode "rational reenactment" dari Morgenthau dan "vicarious problem solving" dari Schelling, yang memiliki kemiripan antara "rational statesman" Morgenthau dan "game theorist" dari Schelling (Graham T. Allison & Phillip Zelicow, 1999).

Model kedua yang dijelaskan oleh Allison yaitu Perilaku Organisasi. Dalam beberapa tujuan perilaku pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan yang dipilih oleh para pengambil keputusan yang sifatnya rasional atau dibawah control sepenuhnya oleh pemerintah. Namun pemerintah disini bukan merupakan individu seperti presiden saja atau hanya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) ataupun keputusan yang diambil hanya dalam sebuah kongres. Namun lebih besar dari itu, Allison mengibaratkan dengan konglomerat yang besar dari organisasi-organisasi yang bersekutu

satu sama lain yang masing-masing darinya memiliki kepentingan dan kehidupan substansial sendiri. Para pemimpin pemerintahan secara formal duduk di puncak konglomerat ini, tetapi pemerintah hanya melihat permasalahan tertentu dari sudut para “organisasi atau rezim” ini. Maka, menurut model kedua, perilaku pemerintah dapat dipahami bukan sebagai pilihan yang disengaja, melainkan sebagai keluaran dari organisasi besar yang berfungsi sesuai dengan pola perilaku standar.

Para ahli teori organisasi awal, seperti Max Weber, memandang organisasi sebagai instrumen rasional yang efektif, bahkan terkadang sangat efektif. Salah satu ciri yang paling menonjol dari kehidupan saat ini adalah seberapa besar perilaku individu dipengaruhi oleh tujuan pengendalian organisasi tempat mereka berada.

Model ketiga yaitu Politik Pemerintahan. Model ketiga ini berfokus pada tindakan pemerintah sebagai output dari organisasi, yang sebagian besar telah dipimpin atau dikoordinasi oleh para pemimpin. Model Politik Pemerintahan merupakan gaya yang lebih luas dalam memahami perilaku pemerintah untuk mengambil keputusan yang terpadu. Namun menurut Allison, Model Politik pemerintahan ini sifatnya lebih jauh dan lebih halus. Para pemimpin yang telah menduduki puncak organisasi memiliki peranan untuk bermain secara kompetitif dengan gaya *bargaining* yang teratur dan penempatannya secara hirarki dalam pemerintahan itu sendiri. Namun dalam sifat Model Politik Pemerintahan pandangan pribadi dalam pengambilan keputusan sangat mungkin terjadi.

Melalui penggunaan model-model ini, Allison mencoba untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan dalam krisis misil Kuba diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Pandangan dari Allison mempengaruhi pemahaman tentang dinamika pengambilan keputusan dalam konteks politik luar negeri dan menjadi salah satu karya klasik dalam studi hubungan internasional. Secara keseluruhan, kontribusi Graham T.

Allison dalam bidang politik luar negeri telah memberikan wawasan penting tentang dinamika pengambilan keputusan dalam situasi krisis dan konflik internasional.

Ada banyak diskusi dan analisis tentang peran Islamisme dalam kebijakan luar negeri Turki. Sejak Recep Tayyip Erdoğan menjadi presiden Turki pada tahun 2014, kebijakan luar negeri pemerintahan telah berubah dan bagaimana kebijakan dipengaruhi oleh prinsip Islamisme. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang peran Islamisme dalam kebijakan luar negeri Turki:

- 1) Fokus pada Solidaritas Muslim: Sejak pemerintahan AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) yang dipimpin oleh Erdoğan, Turki telah menunjukkan kecenderungan untuk memasukkan perspektif pro-Muslim ke dalam kebijakan internasionalnya. Pemerintah telah menekankan pentingnya solidaritas dengan negara-negara Muslim dan berusaha menjadi pemain aktif dalam masalah yang memengaruhi umat Islam di seluruh dunia, seperti konflik di Suriah, konflik Palestina-Israel, dan perang di Yaman.
- 2) Prioritas Hubungan dengan Negara-Negara Muslim: Pemerintahan Erdoğan telah menjadikan pembangunan hubungan dengan negara-negara Muslim sebagai prioritas utama, dan telah melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan posisi Turki di Timur Tengah dan Afrika Utara serta mendapatkan bantuan dalam masalah regional dan global.
- 3) Intervensi dalam Konflik di Suriah: Turki telah terlibat secara aktif dalam konflik di Suriah, termasuk membantu kelompok oposisi bersenjata melawan pemerintah Bashar al-Assad.

- 4) Dukungan untuk Muslim Uighur di Tiongkok: Turki telah menyuarakan keprihatinan atas perlakuan yang dilakukan terhadap komunitas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang Tiongkok, yang mereka anggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ini menunjukkan bagaimana Islamisme membantu masalah kemanusiaan orang Muslim di luar negeri (Ahmad, 2023).

Tantangan Dan kritik Islamisme Di Turki

Negara Turki yang menyuarakan Islamisme tentunya mendapat banyak respon negatif dari berbagai pihak negara maupun non-negara. Hal tersebut dilatar belakangi oleh sejarah turki pada masa Kemal Ataturk yang berupaya menjadikan Turki sebagai negara bangsa dengan cara memisahkan unsur Agama dari Negara. Dan hal tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip sekulerisme yang ada dan akan cenderung mengubah kebijakan menjadi penuh dengan aspek agama. Islamisme juga mendapat kritik sebagai pelanggaran HAM, karena hak beragama adalah hak yang bersifat sensitive. Hal lain juga mempengaruhi Polarisasi pandangan politik pada masyarakat, yang mana aka nada perbedaan pendapat dan pandangan serta respon terhadap kebijakan yang telah terpengaruhi oleh islamisme kebijakan Erdogan. Adapula tantangan yang akan dihadapi Islamisme Erdogan adalah terkait dengan hubungan dan Kerjasama Turki dengan negara-negara Eropa yang mayoritas sangat menentang keras Islamisme dan menerapkan Sekulerisme politik.

Kesimpulan

Recep Tayyip Erdogan telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh pada banyaknya perubahan sistem politik dan konstitusional di Turki. Ideologi Islam yang amat kuat darinya membuat banyak perubahan kebijakan cenderung ke aspek yang Islami dan bahkan terkenal

dengan istilah Islamisme pada turki. Kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh Islamisme itu sendiri pun memberi banyak dampak pada hubungan internasional Turki. Tantangan dan kritik pun menjadi bukti bahwa perubahan yang dibawa Erdogan sangat massiv dan bergerak amat cepat, sehingga bukan hanya di luar negeri, bahkan dalam negeri pun konflik menjadi tak terhindarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Erdogan ingin mengembalikan masa kejayaan islam pada Turki dan memberi pengaruh yang kuat pada negara islam lainya melalui kebijakan luar negeri mereka.

Pada dasarnya kebijakan luar negeri bermula dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan unsur penting yang kemudian dapat menjadi bagian dari sumber perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, perlu kita pahami bahwa konsep kepentingan nasional inilah yang akan digunakan dalam pemodelan politik luar negeri yang berorientasi pada kerakyatan. Dapat kita simpulkan bahwa Kepentingan Nasional sangat bergantung pada kepentingan dalam negeri, yang keduanya saling berkaitan satu sama lain.

Apabila rakyat dijadikan landasan kepentingan nasional, maka berbagai model yang menjelaskan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Rosenau memberikan perspektif mengenai sumber-sumber politik luar negeri yang mengacu pada beberapa elemen kondisi suatu negara. Dalam kasus Turki, Teori Model Aktor Rasional dalam Kepemimpinan Erdogan tentang Orientasi Identitas dan Kebijakan Luar Negeri Turki. Pengaruh konsep Model Aktor Rasional yang dilakukan pada kepemimpinan Erdogan adalah untuk merepresentasikan proyek yang bertujuan untuk politik Islam namun tidak bertentangan dengan negara demokrasi liberal yang mengawali negara Turki. Maka dari beberapa perhitungan yang dilakukan Model Aktor Rasional mempengaruhi Orientasi Politik Identitas Turki yang lebih condong ke Politik Islam.

Orientasi kebijakan luar negeri ini juga akan mempengaruhi kerja sama Turki dengan negara-negara potensial di sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, L. (2023.). *Pengaruh Perluasan Uni Eropa terhadap Dinamika Kebijakan Luar Negeri Turki dalam Lensa English School*.
<https://www.researchgate.net/publication/371680001>
- Graham T. Allison & Phillip Zelicow. (1999). *Explaining the Cuban Missile Crisis*. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
- Junaidi, A., Politik, K., & Tayyib, R. (2016). *Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer* (Vol. 6, Issue 1).
- Khairil Musthafa, A., Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hanik Purwati, S., & Peradaban Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S. (2022). Sejarah dan Tranformasi Politik Turki: Pergulatan Sekularisme dan Islamisme. In *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Vol. 10, Issue 1).
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/index>
- Nabilah, A. R. (n.d.). *KEPEMIMPINAN RECEP TAYYIP ERDOGAN DALAM MEMBANGUN PEMERINTAHAN NEGARA TURKI USMANIA*. <https://www.researchgate.net/publication/352559814>
- Asep Setiawan, Endang Sulastrri and Sumarno, (2018) "Politik Luar Negeri: Aktor dan Struktur". Publisher: UM Jakarta Press.
- Nurhalizah and Mevy Eka (2019) "Kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel pada masa kepemimpinan presiden Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2014-2018". Publisher: UIN Surabaya Journal.

Novi Rizka Amalia, Fathan Fauzan Alhakim, Ahmad Naufaldi, Akmal Aziz & Roziq Heally

Yohanan Benhaim and Kerem Oktem with Title The rise and fall of Turkey's soft power discourse. Publisher: European Journal of Turkish Studies. Year: 2015

Sadra Shahryarifar with Title "A Defence on the Prominence of Rational Actor Model within Foreign Policy Analysis" Publisher: Khazar University Press. Year: 2016

Valerie M. Hudson (2005) "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations". Publisher: Foreign Policy Analysis.

YUCEL BOZDAGLIOGLU (2008) "Modernity, Identity and Turkey's Foreign Policy". Publisher: SET VAKFI Iktisadi İşletmesi, SETA VAKFI.